

2 PENCABUL TURUN PANGKAT 1 TINGKAT

ASN Malas Kerja Dipecat Bupati

WONOSARI (KR)- Bupati Gunungkidul H Sunaryanta kembali melakukan tindakan tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten. Ada tiga pegawai negeri sipil yang dijatuhi sanksi, AN pegawai Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sesuai pasal 11 ayat (2) huruf d point 3 Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021.

Dua yang lain, DDN pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan NG pegawai di Kapanewon Saptosari terbukti melakukan pelecehan seksual kepada siswa praktek kerja lapangan (PKL) di lingkungan kerjanya. "Untuk orang yang melakukan pelecehan seksual dituhui hukuman penurunan pangkat karena melanggar pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 se-

hingga dijatuhi hukuman penurunan pangkat," kata Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul Sunawan SH MH, Selasa (11/7).

Hukuman disiplin pegawai ini dijatuhkan setelah lewat proses panjang. Seperti AN yang tidak masuk kerja selama 10 hari tanpa alasan yang jelas,



KR-Endar Widodo
Sunawan SH MH

sudah dilakukan pembinaan berulang kali tetapi tidak dihiraukan. Setelah melakukan pembinaan dan juga kajian mendalam akhirnya diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri. Dua ASN yang melakukan pelecehan seksual, dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah sela-

ma satu tahun. DDN diturunkan dari Penata Muda Tingkat I menjadi Penata Muda, sedangkan NG diturunkan pangkatnya dari Pengatur menjadi Pengatur Muda Tingkat I. Berdasarkan pasal 28 huruf c Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara nomor 6 Tahun 2022 kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pada atas-an langsung masing-masing DDN oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dan NG oleh Penewu Saptosari.

Bupati Gunungkidul H Sunaryanta menegaskan komitmennya untuk tetap menindak tegas para ASN yang melakukan pelanggaran. "ASN harus menjadi teladan di lingkungan kerjanya dan juga di tengah masyarakat umum," tambahnya.

(Ewi)

Masyarakat Pegunungan Ajukan Permintaan Dropping Air Bersih

PENGASIH (KR) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo, Joko Satyo Agus Nahrowi menjelaskan, pihaknya telah menerima permintaan dropping air bersih dari masyarakat wilayah pegunungan.

Diungkapkan, permintaan dropping air yang diterima berasal dari SD Jatiroto di Purwosari Kapanewon Girimulyo dan satu lain lagi dari Kalurahan Margosari Kapanewon Pengasih.

Permintaan lainnya untuk kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa

(TMMD) di Kalurahan Ngargosari Samigaluh pada Agustus nanti.

"Kami sudah dua kali dropping ke SD Jatiroto dan satu kali ke Margosari. Sementara kami pakai CSR karena SK Tanggap Darurat kekeringan belum bisa dikeluarkan," katanya, Selasa (11/7).

SK Tanggap Darurat bisa keluar jika sudah ada permintaan dari beberapa kapanewon.

Untuk memenuhi permintaan dropping air, BPBD Kulonprogo telah menyiapkan satu mobil tangki.

Koordinasi juga sudah dilakukan dengan Tagana, PMI dan Perumda

Air Minum Tirta Binangun guna mendukung penyaluran air bersih.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kemarau panjang berpotensi terjadi hingga akhir tahun.

Sementara itu Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB) Bakti Purwosari, Purwito Nugroho Wijimulyanto mengatakan, kekeringan saat kemarau panjang berpotensi terjadi di Kalurahan Purwosari, Girimulyo.

Dari 13 pedukuhan, 10 di antaranya berpotensi kekurangan air bersih.

(Rul)

Kenaikan Pajak Restoran Ditolak Beberapa Fraksi

PENGASIH (KR) - Pemkab Kulonprogo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menawarkan untuk kenaikan pajak restoran. Namun kenaikan tersebut ditolak oleh beberapa fraksi, meski ada yang setuju naik tapi dengan beberapa persyaratan, dan adapula yang setuju naik.

"Fraksi Gerindra menolak karena pertama, setelah pandemi korona, pengusaha baru penyesuaian. Bahkan ibarat orang tidur, baru bangun dan belum kembali seperti semula. Kedua, khusus Kulonprogo perekonomian tidak seperti kabupaten/kota di DIY lain," kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kulonprogo Kalis Gatot Raharjo, Selasa (11/7). Sebelumnya beberapa waktu lalu telah diadakan rapat Pansus Pajak Daerah yang dipimpin Sunarwan dari Fraksi



KR-Istimewa
Rapat Pansus Pajak Daerah dengan BKAD

Gerindra dan dihadiri Wakil Ketua 1 Ponimin, Fraksi PDIP, FPartai Golkar, FPAN, FPKS, serta BKAD.

Dikatakan Gatot, yang menolak untuk meningkatkan pajak restoran adalah FPDIP, F Gerindra, dan FPKS. Sedang yang setuju naik FPartai Golkar, FPAN setuju dinaikkan dengan beberapa persyaratan.

"Setelah mendengar ada penolakan, BKAD akan menggali potensi lain. Artinya masih ada potensi lain untuk meningkatkan

PAD, tetapi tidak melalui peningkatan pajak restoran. Sehingga masih menggunakan tarif 8 persen, meskipun itu terkecil sendiri atau bahkan semenarik Indonesia. Namun ini demi kepentingan masyarakat luas," ujarnya.

Menurut Gatot, yang menjadi keluhan rumah makan/restoran di beberapa daerah ada yang sama tetapi tidak kena pajak. Mungkin karena PAD sudah cukup, atau petugas yang kurang jeli. Ini tentu saja menimbulkan kecemburuan oleh sesama peda-

gang. "Sehingga BKAD bisa mendaftar mungkin warung-warung atau rumah makan yang belum kena pajak atau kegiatan perekonomian lain yang mestinya kena pajak tetapi hingga kini belum kena pajak. Sehingga BKAD masih mempunyai solusi," ucap Gatot.

Dikatakan, Kulonprogo meskipun ada Bandara, Stasiun Kereta, dan Terminal tetapi daerahnya tidak banyak dikunjungi orang seperti Gunungkidul dengan pariwisatanya, Sleman dan Kota Yogyakarta dengan mahasiswa, serta Bantul banyak pula tempat wisatanya. Sedang di Kulonprogo tempat wisatanya stagnan, bahkan cenderung lesu. Kalau Bandara itu jelas kegiatan ada di area Bandara. "Di Kulonprogo diharapkan ada kebijakan kearifan daerah sehingga Gerindra dan PKS masih memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat," pungkasnya.

(Wid)

Petugas Satlantas Tilang 60 Pelanggar



KR-Asrul Sani
Pengendara sepeda motor terjaring Operasi Patuh Progo 2023.

WATES (KR) - Sebanyak 60 pengendara bermotor terjaring dan ditilang petugas selama dua hari pelaksanaan Operasi Patuh Progo 2023 yang digelar petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Polres Kulonprogo. Pengendara yang melanggar mayoritas tidak menggunakan plat nomor dan spion.

Kanit Turjawali Satlantas Polres setempat, Ipda Anjar Dwi menjelaskan, Operasi Patuh Progo 2023 di-

laksanakan mulai 10-23 Juli.

Penegakan hukum dilaksanakan secara *hunting* atau mencari pelanggaran secara kasat mata di jalan. Dengan prioritas tujuh pelanggaran meliputi kendaraan tidak dilengkapi plat nomor, spion, helm, Over Dimensi Over Loading (ODOL), berboncengan tiga, *safety belt* dan pelanggaran marka.

"Selama dua hari, Senin dan Selasa (10-11/7) ada 60 orang yang

melanggar lalu lintas. Pelanggaran mayoritas tidak dilengkapi plat nomor dan spion. Kemudian knalpot blombongan dan helm," kata Ipda Anjar, Selasa (11/7).

Pihaknya menduga sejumlah pengendara tidak melengkapi kendaraannya dengan plat nomor supaya terhindar dari Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sehingga dengan adanya Operasi Patuh Progo 2023 pihak meminimalisir pelanggaran kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang didahului pelanggaran.

Selain itu agar masyarakat tertib berlalu lintas agar terhindar dari laka lantas yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pengendara bermotor yang terjaring melanggar lalu lintas, Fadlan mengaku bersalah karena tidak melengkapi surat dan alat keselamatan berlalu lintas.

"Saya melanggar karena tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan kendaraan tidak dilengkapi spion serta plat nomor. Rencana mau ke rumah nenek di Cilacap," tuturnya.

(Dan/Rul)

Penanganan Sampah, Pemkab Libatkan Lintas OPD

WATES (KR) - Dalam upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Komitmen dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh sejumlah OPD. Sehingga penanganan sampah bisa terintegrasi dan terkonvergensi.

Menurut Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Cicilia Susi Setyo Cahyani, sinergitas dilatarbelakangi tumbuhnya sejumlah wilayah di Kulonprogo seperti Bandara Yogyakarta International (YIA), kawasan aetropolis dan perhotelan sehingga menimbulkan timbunan sampah. Sementara, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto di Kapanewon



KR-Asrul Sani
Triyono MSi menandatangani MoU pengelolaan sampah secara terintegrasi dan terkonvergensi.

Nanggulan sudah penuh.

Selain membangun sinergitas, Pemkab juga sedang berproses perluasan TPA Banyuroto seluas dua hektare (ha) dengan dana sekitar Rp 2 m dan Rp 8,8 m untuk pembangunan. Perluasan TPA Banyuroto yang baru nanti untuk menampung sampah hingga 5 tahun mendatang.

"Volume sampah di Kulonprogo saat ini rata-rata 32 ton/ hari. Padahal se-

belum ada YIA dan kawasan baru, volumenya tidak sebanyak itu. Kalau kondisi tersebut tidak segera diantisipasi dan tidak ada intervensi dari hulu atau TPA Banyuroto baru maka belum sampai lima tahun akan penuh. Sehingga OPD kita melibatkan dalam pengelolaan sampah," jelasnya di sela penandatanganan MoU di Ruang Sermo, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Senin (10/7).

(Rul)

OMK Gelar Festival Kesenian Tradisional



KR-Echie Felicia

Salah satu penampil dari Gereja Santa Maria Assumpta Gamping.

LENDAH (KR) - Festival Kesenian Tradisional (FKT) kembali digelar Orang Muda Katolik (OMK) Rayon Kulonprogo, setelah 3 tahun terhenti karena adanya Covid-19. FKT ke-12 ini diselenggarakan Minggu (9/7) di Lapangan Cubung, Botokan, Jatirejo, Lendah, Kulonprogo

Zefanya Amon Krisnandio, Ketua Umum FKT #12

mengatakan, menjadi sebuah tantangan di FKT yang baru diadakan kembali ini, bagaimana membangkitkan kembali semangat Orang Muda Katolik (OMK) yang sempat redup karena pandemi covid-19. Karena itulah, FKT ke-12 ini membawa tema 'Pulih, Gigih, Linuwih'.

"Intinya Pulih, Gigih, Linuwih itu kebangkitan,

sih. Kebangkitan dari banyak hal, dari keterpurukan kita dari pandemi covid-19, dari kita juga yang berjarak karena adanya pandemi covid-19. Jadi kita harus bisa mengusahakan untuk bangkit dan menjadi yang lebih baik dari sebelumnya," ujar Zefanya AK.

Dikatakan, FKT ke-12 ini berlangsung meriah dihadiri oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi, Wakil Bupati Kabupaten Kulonprogo, serta pejabat pemerintahan setempat. Acara ini diawali dengan arak-arakan menuju ke Lapangan Cubung diikutiperwakilan masing-masing Gereja penampil di FKT #12 dengan membawa gunung dan karya seni lukisan.

(*-4)

PEMKAB KULONPROGO BANGGA Murakabi Craft Raih Rekor MURI



KR-Asrul Sani

Kedua mempelai dan Pemilik Murakabi Craft Pargono menerima Piagam MURI dari Perwakilan MURI, Sri Widayati (kiri).

NANGGULAN (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mengapresiasi sekaligus bangga dengan pemilik dan pekerja Murakabi Craft (CV Burhan Purnama Murakabi), salah satu industri kerajinan rumahan atau UMKM yang ada di kabupaten ini. Lantaran berhasil mencatatkan diri di Museum Rekor Indonesia (MURI) usai menggelar pernikahan dengan dekorasi berbahan serat alami terbanyak.

"Kabupaten Kulonprogo memiliki sumber daya serat alam yang potensial dan potensi alam ini terbukti bernilai ekonomis tinggi jika digali, diolah dan dikembangkan menjadi produk yang diterima pasar domestik dan ekspor," kata Plh Bupati setempat Triyono SIP, MSi saat menyaksikan penyerahan Piagam MURI di Murakabi Craft, Kapanewon Nanggulan, Minggu (9/7).

Menurutnya, Piagam MURI bisa dimaknai sebagai pembuktian atas kerja keras para pelaku

UMKM selama bertahun-tahun menekuni produk serat alam yang dikenal ramah lingkungan tersebut.

Sementara itu Sri Widayati dari MURI yang menyerahkan langsung Piagam MURI kepada Pemilik Murakabi Craft, Pargono mengatakan, sangat mengapresiasi pelaksanaan resepsi pernikahan yang megah dan unik.

Dengan dekorasi produk hasil kerajinan rumahan atau UMKM berbahan serat alami mulai dari eceng gondok, pandan, pelepas pisang, serat agel dan daun palem yang memenuhi seluruh lokasi pernikahan sangat layak mendapat apresiasi tinggi.

"Kita saksikan bersama, arena resepsi pernikahan didekorasi begitu indah dan unik. Mewakili Ketum MURI, kami mengesahkan sekaligus mengumumkan Pernikahan dengan Dekorasi Berbahan Serat Alami Terbanyak, resmi tercatat di MURI sebagai rekor yang ke-11.050 sebagai

rekor Dunia," jelas Sri.

Hasil kreatifitas Murakabi Craft berupa lampu-lampu sebanyak 1.000 buah, karpet eceng gondok sepanjang 100 m, karpet pandan 100 m, karpet pelepas pisang 50 m, wall decore 1.000, kursi 1000, meja 250 dan keranjang serat alam sebanyak 1.000 buah, semuanya berbahan serat alam.

Pemilik Murakabi Craft sekaligus orang tua mempelai putri, Pargono mengungkapkan, rekor ini tak lepas dari dukungan dan motivasi tinggi dari tim kreatif Murakabi Craft juga para pengrajin di Kulonprogo.

"Rekor ini berkat dukungan dan motivasi berbagai pihak, Alhamdulillah bisa terwujud. Terima kasih pengrajin yang memberi support juga kepada tim kreatif Murakabi. Penghargaan ini dipersembahkan kepada para pelaku usaha di Kulonprogo. Semoga UMKM di Kulonprogo mendunia," tutur Pargono.

(Rul)